**Studi Perbandingan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten
berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggara Pemilu dengan Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Berdasarkan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**

**AFANI ROWULAN
B10017001**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbandingan antara undang-undang nomor 5 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yaitu mengenai Perbedaan dan Persamaan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dan Menganalisis Kelebihan dan Kelemahan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten. Tipe penelitian ini adalah normatif, yaitu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hokum dari sisi normatif yang dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah memiliki persamaan dan perbedaan dari Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kabupaten dan kelebihan dan kelemahannya. Kesimpulan: dalam undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu dan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum memiliki persamaan yang meliputi: Sama-sama mengawasi penyelenggaraan pemilu, menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu, menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilu di kabupaten/kota, menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilu di kabupaten/kota. Saran: Penyelenggara pemilu yang perlu dikembangkan adalah yang permanen dan bersifat nasional. Mengingat pemilu yang dilakukan di Indonesia adalah pemilu nasional dan lokal yang berlangsung secara reguler. Apabila ingin menghasilkan pemilu yang efektif, demokratis dan berintegritas, perlu pijakan perundangan yang dinamis. Sehingga perundangan tersebut dapat mengantisipasi kelemahan-kelemahan dan peluang-peluang ke arah pelanggaran pemilu yang semakin kompleks pola pelanggarannya.

Kata Kunci : *Perbandingan, Panwaslu Kabupaten, Bawaslu Kabupaten*